



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



LAPORAN AKHIR

PROGRAM KEMITRAAN WALLACEA

**Peningkatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat untuk
Upaya Pengelolaan KKPD Selat Pantar Alor yang Efektif**



DISUSUN DAN DISAMPAIKAN OLEH
PERKUMPULAN TAKA
2021 - 2022

LAPORAN AKHIR PROGRAM

I. INFORMASI PROGRAM

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Koridor Laut Prioritas Solor-Alor
KBA	:	Kawasan Konservasi Perairan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya
Strategic Direction(s)	:	2. Meningkatkan pengelolaan Area Penting bagi Keanekaragaman Hayati (Key Biodiversity Area) dengan atau tanpa status perlindungan resmi 3. Mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat di lokasi dan koridor prioritas
<u>Nama Proyek</u>	:	Peningkatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat untuk Upaya Pengelolaan KKPD Selat Pantar Alor yang Efektif
<u>Nomor Laporan</u>	:	01
<u>Periode waktu</u>	:	Oktober 2021 – April 2022 (6 bulan)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	Maula Nadia (Koordinator program)
<u>Tanggal</u>	:	Jumat, 15 April, 2022

Hibah CEPF:

- (a) dalam USD : 29,336.09
(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 418,605,000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Mei 2021 – April 2022

Lembaga pelaksana (mitra): Perkumpulan TAKA

II. RINGKASAN

Perkumpulan TAKA berikutnya disebut TAKA bekerja pada KBA Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (selanjutnya disebut KKP Selat Pantar), tepatnya di Desa Pulau Buaya, Desa Ternate, dan Desa Munaseli, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesadaran masyarakat tentang praktik perikanan atau pun pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan lainnya yang berkelanjutan masih relatif rendah. Hal ini ditandai penggunaan alat tangkap yang merusak serta kegiatan-kegiatan di zona kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika ini berlanjut, kesehatan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir akan menjadi terancam. Untuk mendukung pengatasan persoalan ini, TAKA bekerja untuk meningkatkan efektivitas dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan KKP SAP Selat Pantar melalui beberapa kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) serta pengembangan potensi pariwisata sebagai sumber mata pencaharian yang sangat berpotensi. Melalui program ini diharapkan KKP SAP Selat Pantar dapat terjaga dan terus berfungsi sebagai salah satu ekosistem laut penting di bioregional Wallacea untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selama periode 1 tahun program (Mei 2021 – April 2022), TAKA telah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pemantauan pemanfaatan sumberdaya (*resource use monitoring*, selanjutnya disebut RUM), instalasi situs rehabilitasi terumbu karang, pengembangan website dan media informasi KKP Selat Pantar, penyadartahuan dan kampanye melalui media informasi, serta pendampingan dan peningkatan kapasitas penguatan bisnis pariwisata. Seluruh kegiatan ini melibatkan 180 orang (71 perempuan, 109 laki-laki) yang mencakup masyarakat dan pemerintah 3 desa target utama (Desa Pulau Buaya, Desa Ternate, dan Desa Munaseli). Pelaksanaan kegiatan TAKA dilakukan atas kolaborasi dan dukungan dari instansi pemerintah maupun mitra-mitra lain di Kabupaten Alor, termasuk Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (KCDKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Alor, Dinas Perikanan Kabupaten Alor, Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Satwas SDKP Flores Timur, Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Alor, Yayasan WWF Indonesia, Thresher Shark Indonesia, Aliansi Bahari Alor, Air Dive Alor dan Nautika Dive Alor.

Beberapa hasil telah dicapai dalam peningkatan kapasitas Pokmaswas, rehabilitasi ekosistem terumbu karang, pengembangan pariwisata berbasis desa, serta kampanye dan promosi kawasan. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan RUM telah dilaksanakan kepada 2 kelompok Pokmaswas, yaitu Pokmaswas Satu Hati (Desa Pulau Buaya) dan Pokmaswas Pulau Terapung (Desa Ternate). Para anggota mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari materi pelatihan yang sudah dilaksanakan pada Bulan Juli melalui pelaksanaan pemantauan RUM langsung sebanyak 4 kali pada Bulan Agustus, September, November, dan April. Tidak hanya meningkatkan kapasitas anggota Pokmaswas, seri kegiatan ini meningkatkan pengawasan kawasan KKP Selat Pantar khususnya di perairan sekitar Pulau Buaya dan Pulau Ternate dengan secara langsung meninjau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP).

Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang berhasil dilakukan dengan instalasi *rockpile* dan struktur Moko di Pulau Buaya. Situs rehabilitasi seluas 70 m² ini diresmikan pemerintah daerah Alor menjadi salah satu lokasi pariwisata berpotensi dengan tajuk Taman Bawah Laut Arca Moko pada Oktober 2021. Berdasarkan hasil pengamatan 5 bulan setelahnya, terlihat sudah ada perkembangan secara ekologis yang

ditandai dengan kehadiran juvenil karang di struktur *rockpile*. Kegiatan rehabilitasi ini didukung penuh oleh masyarakat, terkhusus Kepala Desa Pulau Buaya. Tercatat bahwa hingga saat ini tidak ada kegiatan perikanan yang merusak di sekitar situs tersebut. Dari fungsi wisatanya, Taman Bawah Laut Arca Moko menarik perhatian operator wisata lokal serta membuka peluang BUMDes untuk mengembangkan wisata berbasis desa lebih lanjut. TAKA juga mendukung pembangunan wisata berbasis desa melalui kegiatan pelatihan pemandu wisata di Desa Pulau Buaya dan pengembangan produk lokal di Desa Munaseli.

TAKA berkesempatan untuk mendukung tata kelola kawasan KKP Selat Pantar, melalui pembuatan material publikasi kampanye tentang tata kelola di tingkat desa dan daerah serta mendukung publikasi kawasan di website dan media sosial. Walaupun bukan menjadi fokus program, TAKA juga turut terlibat dalam proses rezonansi kawasan yang dipimpin oleh KCDKP dan Yayasan WWF Indonesia. TAKA menjadi bagian dari skema kemitraan antar organisasi yang dibangun oleh KCDKP, selaku Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan.

Bila disimpulkan, selama periode 12 bulan, program telah memberikan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat terkait ekosistem dan tata kelola KKP Selat Pantar. Kegiatan perikanan yang merusak, khususnya di Desa Pulau Buaya, telah menurun. Dampak lainnya yang terlihat adalah terjaganya kesehatan ekosistem terumbu karang di salah satu lokasi yang terdampak bom ikan melalui kegiatan rehabilitasi. Dengan adanya Pokmaswas yang memiliki kapasitas dalam pengawasan, daerah pesisir dan laut khususnya di sekitar desa target terjaga dari ancaman. Dukungan pemerintah desa pada upaya konservasi dan perlindungan laut meningkat, ditandai oleh munculnya rencana-rencana penerbitan peraturan desa tentang hal ini. Secara keseluruhan, program berhasil untuk berkontribusi dalam peningkatan efektifitas dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan KKP Selat Pantar, Alor dari segi pengawasan, kesehatan ekosistem, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan melalui pariwisata.

III. CAPAIAN

- A. Objective : Peningkatan efektivitas dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Pantar Alor

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan, monitoring dan pengelolaan sumberdaya kelautan di KKP Selat Pantar Alor meningkat
2. Kapasitas kelompok masyarakat dalam mempraktekan usaha yang ramah lingkungan sebagai upaya penguatan mata pencaharian berkelanjutan di KKP Selat Pantar Alor meningkat

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian tingkat keaktifan anggota Pokmaswas dalam kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan dengan *Resource Use Monitoring* (RUM) atau kajian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 4 kali pada bulan Agustus, September, Desember 2021, dan April 2022. Rute atau jalur pemantauan di KKP Selat Pantar disesuaikan agar dapat meliputi semua kategori zona kawasan yang ada dalam kawasan yang meliputi zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pariwisata dan zona perlindungan. Kegiatan diikutsertakan oleh 3 kelompok Pokmaswas: Pokmaswas Desa Ternate, Pulau Buaya, dan Jumlah peserta Pokmaswas dalam setiap kegiatan RUM dapat dilihat pada Tabel 2. Capaian ini dibuktikan dengan alat verifikasi daftar hadir kegiatan.

Indikator 2 dipenuhi melalui capaian penilaian *pre-test* dan *post-test* dalam setiap kegiatan pelatihan kemampuan kelompok masyarakat dalam praktik usaha yang ramah lingkungan. Terdapat 3 kegiatan pelatihan (Tabel 1.). Pada setiap kegiatan pelatihan, *pre-test* (penilaian sebelum kegiatan) dan *post-test* (penilaian setelah kegiatan) dilakukan untuk melihat tingkat perkembangan pemahaman peserta saat mengikuti kegiatan. Secara keseluruhan, melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan TAKA terdapat rata-rata 13.22% peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta. Capaian ini dibuktikan dengan alat verifikasi nilai *pre-test* dan *post-test* setiap kegiatan pelatihan

No	Judul Pelatihan	Peserta	Jumlah Peserta	Rata-Rata <i>Pre Test</i>	Rata-Rata <i>Post Test</i>
1	Pelatihan <i>Resource Use Monitoring</i> (RUM) kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Desa Ternate dan Desa Pulau Buaya	Pokmaswas Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate	20	71.50	81.40
2	Pelatihan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat di Desa Munaseli	BUMDes, Tokoh Masyarakat Desa Munaseli	10	58.75	82.50
3	Pelatihan Pemandu Wisata Snorkeling di Desa Pulau Buaya	BUMDes, Pokmaswas dan Tokoh Masyarakat Desa Pulau Buaya	6	64	70

B. Output

Terdapat 2 Output yang telah dicapai untuk memenuhi Objective program, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman, keterlibatan dan kontribusi masyarakat untuk pengelolaan KKP Selat Pantar Alor dan upaya menjaga Kesehatan ekosistem lautnya
2. Menguatnya mata pencaharian berkelanjutan untuk pariwisata bahari berbasis masyarakat sebagai wujud manfaat Kesehatan ekosistem laut di KKP Selat Pantar Alor bagi masyarakat

Output 1 telah dicapai oleh program di 2 desa target: Desa Ternate dan Desa Pulau Buaya. Indikator Output 1 yang pertama adalah “Setidaknya 2 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memiliki kapasitas yang memadai dan berkontribusi dalam mendukung efektivitas KKP, khususnya dan pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan di KKP Selat Pantar Alor”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

1. Menginisiasi, meningkatkan kapasitas dan melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan sumber daya alam KKP Selat Pantar oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di dua desa utama

Kegiatan ini terdiri dari 2 rangkaian kegiatan yaitu pelatihan dan pendampingan *resource use monitoring* (Pokmaswas). Kegiatan pelatihan dan pendampingan dihadiri oleh 2 kelompok Pokmaswas: Pokmaswas Desa Pulau Buaya (Kelompok Satu Hati) dan Pokmaswas Desa Ternate (Kelompok Pulau Terapung). Pelatihan dilaksanakan pada Rabu, 28 Juli 2021 di Kota Kalabahi secara *hybrid*. Pelatihan ini ditujukan untuk Pokmaswas agar mampu memberikan pengetahuan dan praktik mengenai pengawasan sumber daya pesisir sebagai upaya menekan ancaman terhadap kawasan. Pendekatan dari masyarakat dan untuk masyarakat bisa dianggap merupakan pendekatan yang lebih efektif dengan mengandalkan sistem kekeluargaan di kalangan internal masyarakat itu sendiri.

Pelatihan diikuti oleh 20 anggota Pokmaswas (11 orang dari Pokmaswas Pulau Terapung dan 9 orang dari Pokmaswas Satu Hati). Pelatihan ini akan melibatkan para pihak terkait (*stakeholder*) mulai dari pemerintah desa, Unit Pengelola Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Alor, Satuan Polairud Polres Alor dan kelompok masyarakat serta Yayasan WWF Indonesia. Kegiatan pelatihan mengundang 4 narasumber yaitu, Krisnawan Nindito (Satwas SDKP Flores Timur) yang membawakan materi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah pesisir, perairan, dan pulau-pulau kecil; Wediawati Jakaria (KDCKP Provinsi NTT Wilayah Alor) yang membawakan materi tentang peran Pokmaswas dalam pengawasan KKP SAP Selat Pantar; Pahlawan Djafar (Dinas Perikanan Kabupaten Alor) yang membawakan materi tentang pentingnya pemberdayaan nelayan dalam usaha mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan; dan Haries Sukandar (Yayasan WWF Indonesia) yang membawakan tentang pemantauan dan pengawasan dengan metode RUM.

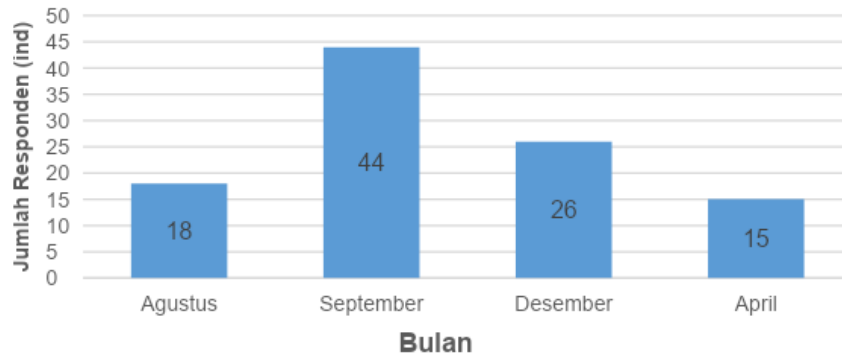
Mengikuti kegiatan pelatihan, pendampingan RUM dilakukan sebanyak 4 kali pada Bulan Agustus, September, Desember 2021, dan April 2022. Kegiatan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan praktik langsung mengenai pengawasan sumber daya pesisir sebagai upaya menekan ancaman terhadap keberlangsungan program pengelolaan KKP. Pada RUM pertama,

kegiatan pendampingan dilakukan secara terpisah, yakni pada tanggal 11 untuk Pokmaswas Satu Hati (Desa Pulau Buaya) dan tanggal 12 untuk Pokmaswas Pulau Terapung (Desa Ternate). Kegiatan pengawasan diikuti oleh 38 orang yang terdiri dari anggota Pokmaswas, pemerintah desa, serta KCDKP Alor dan Polairud Alor. Pengawasan dan pengamatan pemanfaatan SDKP ini dilakukan di dalam Zona Pemanfaatan Pariwisata sepanjang 10 km untuk Desa Ternate dan 7 km untuk Desa Pulau Buaya dengan mewawancarai langsung para pelaku pemanfaat di kawasan tersebut. Sedangkan untuk RUM kedua hingga keempat, TAKA berkolaborasi dengan Yayasan WWF Indonesia. Berbeda dengan pendampingan RUM pertama, kali ini pengawasan dilakukan di seluruh zona KKP SAP Selat Pantar yang mencakup Zona Inti, Zona Pariwisata, Zona Perikanan Berkelanjutan Lokal, dan Zona Perlindungan.

Tabel 2. Peserta kegiatan kajian RUM di KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (2021 - 2022)

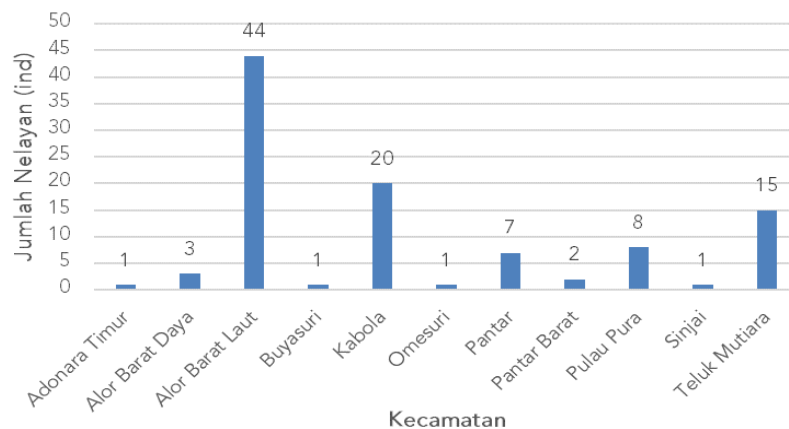
No	Instansi	Tugas dan Fungsi
1	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor	Sosialisasi dan Penjangkauan Masyarakat terkait regulasi di Kawasan Konservasi
		Memberikan edukasi dan penyadartahuan apabila terjadi pelanggaran di Kawasan Konservasi
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	Sosialisasi dan Penjangkauan Masyarakat Nelayan terkait Pemberdayaan
3	Yayasan WWF Indonesia	Melakukan Pengisian Form wawancara via KoboToolBox
		Dukungan dalam pembelajaran RUM
		Pengambilan Dokumentasi Kegiatan
4	Kodim 1622 Alor/ Pos Angkatan Laut Pulau Alor	Mengumpulkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan
5	Satuan polairud Polres Alor	Dukungan patroli aktivitas perikanan merusak
		Dukungan ketertiban masyarakat di wilayah perairan kabupaten
6	Pokmaswas (Kabola, Ternate, Pulau Buaya)	Wawancara dengan responden menggunakan bahasa lokal
		Mengisi LogBook Pokmaswas
7	Yayasan TAKA	Penanggung jawab dan Fasilitator Kegiatan RUM
		Melakukan Pengisian Form via KoboToolBox
8	Nautika Dive Alor	Dukungan Operasional Kapal
8	Pascal Art	Dokumentasi Aerial

Hasil dari pemantauan pemanfaatan SDKP (RUM) yang dilakukan di dalam KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya periode program menemukan total 103 pemanfaatan secara langsung (ekstraktif). Data pengguna manfaat pada pemantauan RUM ini keseluruhan merupakan nelayan (pemanfaat bergerak). Data pemanfaatan SDKP pada saat pemantauan bisa dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Data pengguna manfaat di KKP Selat Pantar tahun 2021-2022

Data pengguna manfaat tertinggi tercatat pada bulan September 2021 dengan jumlah nelayan sebanyak 44 orang. Sementara data pengguna manfaat terendah ada pada bulan April 2022, dimana hal ini dikarenakan lama waktu pemantauan yang hanya dua hari serta waktu pengamatan yang bertepatan dengan aktivitas nelayan yang berkurang pada bulan puasa. Asal pemanfaat sumberdaya bergerak di KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya berasal dari 4 kabupaten dengan didominasi oleh nelayan dari Kabupaten Alor sejumlah 99 responden dan nelayan dari Kabupaten Sinjai 1 responden, Kabupaten Flores Timur 1 responden serta Kabupaten Lembata 2 responden. Berdasarkan asal kecamatan yang diketahui dari hasil RUM, pemanfaat berasal dari 11 kecamatan dan 29 desa/kelurahan yang didominasi oleh nelayan dari Kecamatan Alor Barat Laut dan Desa Pulau Buaya.



Gambar 2. Kecamatan asal pengguna manfaat

Hasil kegiatan RUM juga menunjukkan terdapat empat jenis kapal yang beroperasi dan digunakan oleh nelayan di KKP Selat Pantar yakni sampan, ketinting, kapal mesin dalam dan kapal mesin tempel. Jenis kapal yang dominan dipakai adalah jenis sampan sejumlah 43 kapal. Sedangkan untuk alat tangkap dominan adalah jenis *handline* sejumlah 44 nelayan, kemudian alat

tangkap jenis pancing dasar sejumlah 24 nelayan. Komposisi 11 jenis alat tangkap yang ditemukan saat pemantauan bisa dilihat pada gambar 4.

Selama kegiatan RUM, selain dilakukan pemantauan pemanfaatan SDKP juga dilakukan kegiatan pengumpulan informasi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi perairan serta penyebarluasan kepada pemanfaat tentang KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa 95.15% responden belum mengetahui kawasan konservasi perairan dan sejumlah 4.85% telah mengetahui kawasan konservasi yang semuanya merupakan nelayan dari Kecamatan Alor Barat Laut. Data ini sejalan dengan temuan selama kegiatan RUM dimana pemanfaatan SDKP yang masih belum tepat guna sesuai PERDA No 4 tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT. Pemanfaatan belum sesuai dengan empat sistem zonasi di KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya yaitu Zona Inti, Zona Pariwisata, Zona Perikanan Berkelanjutan Lokal, dan Zona Perlindungan.

Kegiatan ini dibuktikan oleh alat verifikasi:

- Materi pelatihan RUM ([disini](#))
 - TOR kegiatan pelatihan dan pelaksanaan pengawasan ([disini](#))
 - Hasil laporan pelatihan peningkatan kapasitas POKMASWAS dampingan ([disini](#))
 - Hasil pre-test dan post-test pelatihan POKMASWAS ([disini](#))
 - Logbook pengawasan POKMASWAS ([disini](#))
 - Dokumentasi kegiatan pelatihan ([disini](#))
 - Dokumentasi kegiatan RUM ([disini](#))
 - Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan monitoring regular sumber daya laut oleh POKMASWAS ([disini](#))
2. Melakukan upaya penyadartahuan dan kampanye kepada masyarakat terkait tata kelola, kebijakan dan pentingnya KKPD Selat Pantar Alor untuk mendukung kelestarian alam dan menjaga kelangsungan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan pariwisata bahari dengan menyebarkan informasi dan pemasangan media/papan informasi di pusat-pusat fasilitas umum serta inovasi-inovasi penyadartahuan publik lainnya

Kegiatan pembuatan media informasi adalah sebagai upaya penyadartahuan dan kampanye kepada masyarakat terkait tata kelola, kebijakan dan pentingnya KKP SAP Selat Pantar untuk mendukung kelestarian alam dan menjaga kelangsungan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan pariwisata bahari. Terdapat 4 jenis media informasi yang telah disusun, yakni: leaflet, buku panduan, booklet, dan papan informasi. Keempatnya memiliki konten informasi yang berbeda. Dalam penyusunan media informasi ini, TAKA didukung oleh beberapa mitra seperti Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMaT (IKAMaT), Seagrass Conservation and Research Center (SEACREST), dan Yayasan WWF Indonesia dalam bentuk penyediaan foto-foto tertentu.

Leaflet bertajuk “Peta dan Panduan Pariwisata KKP SAP Selat Pantar” berisikan tentang tips untuk para wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata di kawasan beserta dengan beberapa lokasi pariwisata yang disajikan dalam bentuk peta. Buku “Panduan Kebijakan KKP SAP Selat Pantar” merupakan buku panduan yang berisikan informasi umum tentang kegiatan di dalam kawasan. Disertakan pula jenis pelanggaran dan alur pelaporan pelanggaran. Berbeda dengan

Booklet Ekosistem yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekosistem pesisir utama. Papan informasi yang nantinya akan dipasang di Desa Ternate dan Desa Pulau Buaya berisikan informasi tentang zonasi dan legalitas nelayan.



Gambar 3. Cover media informasi (kiri: buku panduan; kanan: booklet ekosistem)

Pada November 2021, seluruh material publikasi didistribusikan secara daring dan luring. Material publikasi disebarakan kepada mitra TAKA di Alor, antara lain: KCDKP Alor, DKP Alor, Dispar Alor, DLH Alor, Air Dive Alor, Nautika Dive Alor, SMK Kalabahi, MAN Kalabahi, Mts Ternate dan Pulau Buaya. Selain itu, TAKA berkoordinasi dengan pihak Bandarar Mali untuk kerja sama peletakan leaflet dan buku panduan. Sedangkan untuk pemasangan papan informasi dilakukan di Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate.

Kegiatan ini dibuktikan oleh alat verifikasi:

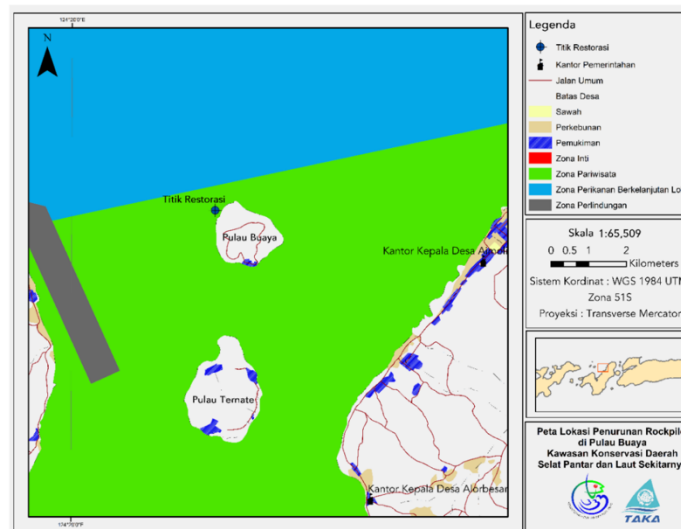
- Materi dan desain media informasi ([disini](#))
- 2 papan informasi tercetak dan terpasang ([disini](#))
- 50 leaflet tercetak dan tersebar ([disini](#))
- 10 buku panduan tercetak dan tersebar ([disini](#))
- Dokumen elektronik leaflet dan buku panduan tersedia dan tersebar ([disini](#))

Indikator yang kedua dari Output 1 adalah “Setidaknya 10 orang masyarakat aktif memberi dukungan melalui partisipasi dalam kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem laut di KKP Selat Pantar Alor”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

1. Melakukan upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan metode rockpile dengan pelibatan masyarakat

Upaya rehabilitasi terumbu karang dilakukan di Desa Pulau Buaya. Desa Pulau Buaya adalah salah satu desa di KKP Selat Pantar, Kabupaten Alor dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi. Walaupun begitu, masih ditemukannya kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*). Untuk mendorong Desa Pulau Buaya dengan potensi sumber daya yang sesuai dengan roadmap Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (KCDKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Wilayah Alor sebagai daerah yang diproyeksikan menjadi tujuan wisata bahari dan masuk dalam Zona Pemanfaatan Pariwisata. Salah satu upaya untuk mendukung hal ini dilakukan TAKA dengan merehabilitasi ekosistem menggunakan metode *rockpile*. Kegiatan rehabilitasi ini terdiri dari rangkaian, Survei lokasi, Instalasi dan Peresmian, dan Monitoring.

Survei sekaligus sosialisasi dilakukan pada tanggal 7 September 2021 bersama Aliansi Bahari Alor – Air Dive Alor dan KCDKP Alor di Pulau Buaya. Hasil yang menunjukkan bahwa Desa Pulau Buaya memenuhi kriteria lokasi penurunan *rockpile* karena disamping memiliki situs yang menunjukkan kerusakan akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tetapi memiliki kejernihan perairan yang masih tergolong baik, serta tersedia situs dengan terumbu karang yang sehat sebagai sumber organisme karang untuk pasokan larva. Ditetapkan situs di bagian barat laut pulau (124.36786° BT, 8.17058° LS.).



Gambar 4. Peta lokasi situs rehabilitasi (titik restorasi) di Desa Pulau Buaya

Pada 28 Oktober 2021, Kegiatan instalasi struktur *rockpile* diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat di Desa Pulau Buaya diantaranya, Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Guru, Pelajar dan Mahasiswa. Acara yang diinisiasi oleh Yayasan TAKA dengan KCDKP Alor serta Pemerintah Desa Pulau Buaya ini dimulai dengan agenda formal dengan tajuk “Peresmian Taman Bawah Laut Arca Moko”. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa dinas terkait antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian dari aparat penegak hukum yakni Polres, Kodim dan Satpol PP. Selain itu, kegiatan dihadiri oleh perwakilan akademisi dari Universitas Tribuana Alor serta NGO, yaitu Yayasan WWF Indonesia dan Thresher Shark

Indonesia. Total peserta yang terlibat lebih dari 105 orang dengan jumlah laki-laki 53 orang dan jumlah perempuan 51 orang.

Lokasi penurunan struktur rockpile berada pada bagian barat Pulau Buaya dengan kedalaman 7-8 m. Setelah melakukan peletakan keseluruhan struktur yang terdiri dari satu replika Moko, empat Hexadome dan batu kapur (*rockpile*) didapatkan luasan area rehabilitasi terumbu karang dengan metode rockpile seluas 75 m². Khusus untuk luasan batu kapur yang disusun adalah 8 x 2 m atau seluas 16 m². Situs ini ditetapkan dengan nama Taman Bawah Laut Arca Moko.

Pada Bulan Maret 2022, 5 bulan setelah instalasi, TAKA melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan situs. Kegiatan monitoring rockpile diikuti oleh KCDKP Alor selaku pengelola KKP Selat Pantar dan juga mitra Nautika Dive Alor dan Yayasan WWF Indonesia dalam hal ini turut membantu dalam penyelaman pengambilan data. Beberapa data yang didapatkan setelah pemantauan lokasi salah satunya adalah Tutupan Karang yang menunjukkan persentase atau seberapa luas karang yang masih tersedia di suatu titik lokasi survei. Hasil pemantauan Rockpile di titik restorasi didapatkan persentase karang keras (*hard coral*) sudah tumbuh sejumlah 1.11%, kemudian persentase biota lainnya dengan jenis koralin alga (*coralline algae*) dengan persentase sebesar 47.78% yang merupakan tahap awal dari menempelnya larva-larva karang.

Hasil pemantauan selanjutnya dipaparkan dalam kegiatan diseminasi hasil kajian yang dihadiri oleh diikuti oleh beberapa dinas terkait antara lain KCDKP Alor, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta dari Desa Pulau Buaya meliputi elemen masyarakat dari Pokmaswas, BUMDes dan Pemerintah Desa. Sesi diskusi hasil kajian restorasi terumbu karang dengan metode rockpile dan rencana program oleh pemerintah daerah alor. Diskusi hasil kajian rockpile untuk membahas rencana kerjasama di bidang lingkungan darat dan laut yang bisa berefek pada kelangsungan pariwisata berkelanjutan di Alor.



Gambar 5. Pemantauan Taman Bawah Laut Arca Moko (Yayasan TAKA/Maula Nadia)

Kegiatan ini dibuktikan oleh alat verifikasi:

- Titik koordinat lokasi instalasi *rockpile* (124.36786° BT, 8.17058° LS.).
- ToR dan rencana desain kegiatan rehabilitasi tersedia ([disini](#))

- Struktur fisik bentuk rehabilitasi terumbu karang dengan metode *rockpile* telah terpasang ([disini](#))
- Daftar hadir kegiatan:
 - Instalasi dan Peresmian ([disini](#))
 - Diseminasi ([disini](#))
- Laporan hasil pemantauan *rockpile* ([disini](#))
- Dokumentasi kegiatan
 - Instalasi dan Peresmian ([disini](#))
 - Pemantauan ([disini](#))

Output 2 telah dicapai oleh program di 2 desa target: Desa Munaseli dan Desa Pulau Buaya. Indikator Output 2 yang pertama adalah “Dua kelompok masyarakat dampingan pariwisata di KKPD Selat Pantar Alor memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha ekowisata di daerahnya”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan berikut:

1. Melakukan upaya pendampingan, peningkatan kapasitas dan penguatan bisnis untuk wisata bahari berbasis masyarakat di dua desa dampingan sebagai wujud manfaat kesehatan ekosistem laut di KKP Selat Pantar Alor bagi masyarakat

TAKA mendukung upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) di 2 desa utama, yaitu Desa Pulau Buaya dan Desa Munaseli. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuka peluang alternatif mata pencaharian yang sejalan dengan menjaga sumber daya perairan yang dimiliki. Kegiatan dijalankan dengan pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam mengembangkan produk dan jasa.

Desa Pulau Buaya memiliki potensi pengembangan pariwisata alam. Pulau Buaya termasuk ke dalam zona pariwisata KKP Selat Pantar, karena diketahui memiliki beberapa titik penyelaman dengan kekayaan ekosistem terumbu karang yang menjadi destinasi wisata selam. Selain itu, ditambah dengan Taman Bawah Laut Arca Moko (situs rehabilitasi terumbu karang TAKA) yang menawarkan situs selam yang unik dengan adanya struktur Moko. Melihat potensi-potensi ini, pengembangan yang dilakukan di Desa Pulau Buaya adalah kapasitas masyarakat sebagai pemandu wisata berenang dan snorkeling. Sebanyak 6 peserta dari BUMDes dan Pokmaswas Desa Pulau Buaya mengikuti kegiatan pemandu wisata yang berisikan tentang: kiat-kiat memulai bisnis wisata, standar pemandu wisata, dan simulasi teknik memandu wisata. Kegiatan pelatihan dibawakan oleh 3 narasumber: Marcellius Bili (Dinas Pariwisata Kabupaten Alor), Haries Sukandar (Yayasan WWF Indonesia), Hansen Oei (Nautika Dive Alor). Hasil *pre-test* dan *post-test* pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan oleh peserta pelatihan dengan rata-rata nilai 70.

Setelah kegiatan pelatihan, dilaksanakan pendampingan pengembangan usaha lebih lanjut. Pendampingan dilakukan kepada kelompok pemandu wisata (termasuk BUMDes Desa Pulau Buaya) untuk melakukan uji coba pemanduan wisata. Kegiatan pendampingan didampingi praktisi dari sektor swasta yaitu Nautika Dive Alor. Hasil dari pendampingan adalah adanya profil ekowisata Pulau Buaya dan pembuatan paket wisata unggulan desa. Profil ini dibuat dalam bentuk poster untuk memudahkan penyebarannya. Hingga saat ini, poster sudah disebar

kepada pemangku kepentingan lokal dan media informasi Alor termasuk website KKP Selat Pantar.

Desa Munaseli terdapat BUMDes Manusirikoko yang mengelola kegiatan bisnis dan ekowisata desa, serta Pokmaswas Tanjung Muna sebagai komunitas pengawasan pesisir dan laut. Salah satu Desa Munaseli sudah memiliki produk lokal, yaitu *Virgin Coconut Oil* (VCO) atau minyak kelapa murni yang diinisiasi oleh salah satu individu di desa. Produk ini sudah memiliki peminat lokal, akan tetapi masih terbatas, karena produksi oleh perseorangan serta belum memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Berdasarkan hal ini, pelatihan dan pendampingan di Desa Munaseli difokuskan kepada pembuatan kemasan produk VCO dan pentingnya surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pelatihan yang diikuti oleh 10 orang peserta dari BUMDes dan masyarakat umum desa ini dibawakan oleh narasumber dari Dinas Pariwisata, Nautika Dive Alor, dan pengrajin Pulau Pura. Hasil dari pelatihan ini adalah terbuatnya *prototype* kemasan alternatif VCO. Hasil *pre-test* dan *post-test* pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan oleh peserta pelatihan dengan rata-rata nilai 82,5.

Dengan kemasan baru tersebut, diharapkan nilai produk dapat bertambah. Selain dari kemasan, pembuatan logo dan label produk baru juga dilakukan. Pembuatan logo terbaru ini dimaksudkan untuk menjadikan nama Manusirikoko sebagai sebuah brand yang ada di setiap produk hasil olahan oleh kelompok usaha di Desa Munaseli yang saat ini masih dikelola perorangan oleh ketua BUMDes Munaseli, Rubenson Hibu. Pada proses pendampingan, TAKA juga mendukung promosi dengan pembuatan media sosial untuk BUMDes Manusirikoko.

Kegiatan ini dibuktikan oleh alat verifikasi:

- Materi pelatihan
 - Desa Pulau Buaya ([disini](#))
 - Desa Munaseli ([disini](#))
- TOR pelatihan
 - Desa Pulau Buaya ([disini](#))
 - Desa Munaseli ([disini](#))
- Laporan hasil pelatihan ([disini](#))
- Informasi paket wisata Desa Pulau Buaya ([disini](#))
- Informasi produk VCO Desa Munaseli ([disini](#))

Indikator Output 2 yang kedua adalah “Informasi terkait objek ekowisata bahari tersedia dan disebarluaskan di media online sebagai bagian upaya promosi”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa kegiatan berikut:

1. Melakukan upaya promosi pariwisata bahari di KKP Selat Pantar Alor untuk mendukung upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di Alor melalui pengembangan, penguatan dan promosi media informasi online ke publik

Untuk mendorong sektor pariwisata diperlukan upaya profiling dan promosi ekowisata bahari di Alor di media online untuk memberikan penjangkauan audien yang lebih luas. Hal ini untuk meningkatkan upaya peningkatan wisatawan ke Alor dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip ekowisata yang

bertanggungjawab termasuk mematuhi best practices dan ketentuan daya dukung dan daya tampung pariwisata yang dikembangkan di KKP Selat Pantar. KKP Selat Pantar Alor sudah memiliki beberapa kanal media sosial dan website. TAKA mendukung pengelolaan dan keberlanjutan dari media-media ini dengan melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola kawasan dan pemuda di Kabupaten Alor.

Peningkatan kapasitas yang dibuat dalam format *workshop* ini dilaksanakan selama 2 hari fokus kepada pengelolaan website dan media sosial serta pembuatan konten kreatif dan menulis artikel. Kegiatan diikuti oleh 15 orang peserta dengan rincian 8 orang peserta dari KCDKP Alor (SUOP KKP Selat Pantar) dan 7 orang dari SMA dan SMK di Kota Kalabahi dan juga perwakilan dari Universitas Tribuana dan STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Narasumber kegiatan adalah Ahmad Sopian (Astra Tech) yang menjelaskan tentang pengelolaan website, Wahyu Teguh Prawira (Burung Indonesia) yang menjelaskan tentang cara menulis, dan Nofita Ayu Matoneng (Zoom Alor) yang menjelaskan tentang pembuatan konten kreatif.

Dari pelatihan, para peserta diarahkan untuk praktik langsung dalam pembuatan konten kreatif maupun tulisan/artikel. Beberapa hasil pelatihan yang dilakukan oleh peserta antara lain adalah draft tulisan berupa artikel yang diserahkan langsung ke pengelola website (www.kkpalorpantar.com) yakni SUOP KKP Selat Pantar. Artikel tersebut akan menjadi bagian konten website. Artikel akan melalui proses revisi oleh admin website, yaitu dari SUOP KKP Selat Pantar. Selain tulisan, salah satu peserta juga berhasil membuat konten kreatif yang dibagikan di media sosial Instagram. Konten yang dibuat adalah tentang salah satu lokasi pantai di Kabupaten Alor, Pantai Batu Putih oleh peserta Wafiq Nania (MAN 1 Alor).

Kegiatan ini dibuktikan oleh alat verifikasi:

- Website dan media sosial KKP Selat Pantar Alor (www.kkpalorpantar.com)
 - Instagram ([disini](#))
- Laporan kegiatan *workshop* website dan media sosial ([disini](#))

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
Penyu	Perburuan, Perdagangan	Tidak diketahui jumlah pemanfaat dan lokasi pasti peneluran penyu	Form baseline dan endline

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Koridor Laut Prioritas Solor-Alor (3 Desa: Desa Ternate, Desa Pulau Buaya, Desa Munaseli)	Upaya Rehabilitasi Terumbu Karang dengan Metode Rockpile	Terumbu Karang 75 m ²	Laporan kegiatan instalasi rockpile di Desa Pulau Buaya

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya	Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur	276.693,38 Hektar / 2015	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 / KEPMEN-KP / 2015

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan isi checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas										
	Ekonomi Subsisten	Small landowners (pemilik lahan)	Masyarakat hukum adat	Pastoralists / nomadic peoples (nomad/berpindah)	Recent migrants (pendatang baru)	Masyarakat lokal	Lainnya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
								50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Desa Pulau Buaya						V				V	
Desa Ternate						V				V	
Desa Munaseli						V				V	

b. Jumlah penerima manfaat

Penerima manfaat langsung adalah mereka yang langsung terlibat dan langsung mendapat manfaat dari program, dihitung per jiwa dan bukan per keluarga. Dibuktikan dari daftar hadir dan pendokumentasian lainnya (misalnya data monitoring).

Penerima manfaat tidak langsung adalah para penduduk desa serta pihak-pihak lain yang juga dapat memetik manfaat dari program, misalnya supplier UPI yang mendapat bahan ikan berkualitas.

Manfaat Keuangan (*Cash Benefit*)

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya akses terhadap dunia usaha	10	6	1692	1730
Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan				
Meningkatnya akses terhadap konsumen				

Meningkatnya pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan				
Meningkatnya pendapatan antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan				
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 per bulan				
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan				
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 5.000.000 per bulan				

Manfaat Peningkatan Kapasitas

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Akses terhadap data/informasi dan kesempatan untuk memahami makna data/informasi				
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di komunitas/kelompok				
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan				
Akses terhadap layanan publik (misalnya kesehatan, pendidikan, listrik)				
Pengakuan atas kearifan lokal dan tata kelola lokal				
Pelatihan/diskusi/lokakarya	109	71	2424	2473

(lampirkan kompilasi nama peserta pelatihan dan topik pelatihan untuk memastikan tidak ada penghitungan berulang)				
---	--	--	--	--

Manfaat Layanan Alam Pesisir/Laut

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya ketersediaan pangan (misalnya melalui pemanfaatan ikan, kerang, kepiting dalam ekosistem mangrove, ataupun meningkatnya stok ikan karena adanya bank ikan)				
Meningkatnya ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi (rehabilitasi terumbu karang dengan metode rockpile)	24	45	887	879
Meningkatnya ketangguhan terhadap risiko bencana (misalnya: mangrove sebagai penahan gelombang/tsunami, lamun sebagai pencegah abrasi)				
Meningkatnya akses terhadap keindahan alam (rekreasional, batin) (rehabilitasi terumbu karang dengan metode rockpile)	24	45	887	879
Meningkatnya peluang adanya komoditas baru yang berkelanjutan (misalnya garam, wisata alam) (rehabilitasi terumbu karang dengan metode rockpile)	24	45	887	879
Lain-lain				

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama para pihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
Pokmaswas Desa Pulau Buaya	Desa	Perpanjangan tangan KCDKP Alor dalam usaha pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	2021
Pomaswas Desa Ternate	Desa	Perpanjangan tangan KCDKP Alor dalam usaha pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	2021

7. Bentang alam/laut produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

Berdasarkan proyek dan kegiatan yang telah dilaksanakan TAKA pada periode 2021-2022, terdapat sejumlah capaian yang melebihi ekspektasi awal. Terdapat perubahan perilaku masyarakat di KKP Selat Pantar, khususnya di Pulau Buaya dalam praktik perikanan. Jumlah kejadian perikanan merusak (*destructive fishing*) dengan bom yang sebelumnya menjadi hal umum, sekarang menurun sangat drastis. Berdasarkan laporan dari kepala desa Pulau Buaya dan Ternate, sejak pertengahan 2021 hingga saat laporan ini ditulis, belum ada kejadian perikanan merusak di sekitar pulau. Hal ini menjadi capaian yang luar biasa, mengingat khususnya nelayan Desa Pulau Buaya memiliki citra sebagai ‘pengebom’. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatnya pemahaman dan upaya dari pemerintah desa dan lembaga desa (Pokmaswas) untuk menjaga kesehatan laut. Semakin banyak tokoh-tokoh di desa yang mengedepankan konservasi dan secara khusus mencegah *destructive fishing*. Penguatan kelembagaan desa menjadi sangat penting dalam hal ini. Karena pengawasan serta penyadartahuan kepada masyarakat lokal desa paling efektif berangkat dari sesama masyarakat itu sendiri. Penguatan kelembagaan desa didukung dengan peningkatan kapasitas para anggotanya.

TAKA menilai bahwa kegiatan instalasi *rockpile* ‘Taman Bawah Laut Arca Moko’ sebagai upaya rehabilitasi di Desa Pulau Buaya menjadi salah satu kegiatan paling sukses selama periode proyek. Hal ini disebabkan oleh kegiatan konservasi di laksanakan di desa secara berkesinambungan dari pelatihan dan pendampingan RUM kepada Pokmaswas, hingga ke instalasi *rockpile*. Dilaksanakannya kegiatan ini dalam periode waktu yang sama menyebabkan partisipasi masyarakat tinggi, karena terlihat adanya ketersinambungan antara satu kegiatan dan lainnya. Keberhasilan kegiatan didukung oleh pelibatan mitra lintas sektor. Tidak hanya mitra NGO dan dinas terkait, namun juga aparat keamanan dan *diving operator*. Masyarakat Desa Pulau Buaya terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan instalasi *rockpile*. Struktur-struktur dibuat oleh masyarakat desa, kegiatan peresmian dimeriahkan oleh masyarakat desa dengan tarian adat, makanan, dan sebagainya, serta proses instalasi didukung secara penuh oleh masyarakat pula. Pelibatan *multi-stakeholder* meningkatkan nilai kegiatan, karena mampu memunculkan rasa kepemilikan terhadap situs rehabilitasi tersebut. Maka keberlanjutannya semakin bisa dipastikan.

Tentu selama berjalannya proyek ada beberapa kendala dan tantangan. Kendala yang pertama adalah terkait kelompok masyarakat. Kekuatan kelembagaan seperti Pokmaswas sudah cukup baik, namun antusiasme pemuda untuk ikut serta masih sangat kurang. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan kelompok, karena tidak ada regenerasi anggota. Selain itu, perubahan dinamika jabatan dalam kelompok atau pun tingkat dinas akibat politik. Akibatnya, komunikasi dengan *stakeholder* sering kali tidak efektif, sehingga berpengaruh dalam implementasi kegiatan proyek. Tantangan selanjutnya adalah terkait sarana dan fasilitas pendukung di desa. Hal ini menjadi kendala untuk pelaksanaan usaha pariwisata dan pengawasan oleh masyarakat secara mandiri.

Selama proyek, TAKA selalu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Alor yang terdiri dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan mitra lokal lainnya dalam seluruh kegiatan. Hal ini membantu memastikan keberlanjutan upaya-upaya konservasi hingga setelah program berakhir. Karena tentu para *stakeholder* ini lah yang akan terus bekerja di Alor. Selain itu, dalam

program pengembangan usaha berkelanjutan, keberlanjutan proyek dipastikan dengan pelibatan sektor swasta (operator selam, resort, hotel, restoran, media) dalam membantu promosi produk masyarakat. Salah satu bentuknya adalah rencana Nautika Dive Alor, salah satu operator pariwisata di Alor, untuk mengintegrasikan wisata Pulau Buaya dalam salah satu paket wisata yang mereka tawarkan. Dalam paket wisata ini, mereka berencana untuk melibatkan pemandu wisata lokal Pulau Buaya yang sebelumnya sudah dilatih pada program TAKA.

Bila program ini hendak direplikasi, ada beberapa poin rekomendasi yang dapat dipertimbangan, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas anggota dan kekuatan Pokmaswas sebaiknya dimulai dengan pengembangan kapasitas internal (kelompok). Pengembangan kapasitas internal antara lain, kemampuan administrasi, keuangan, keanggotaan (regenerasi), dan kemitraan. Selanjutnya baru dengan pengembangan kapasitas eksternal (kemampuan, skill yang relevan), misalnya pemantauan ekosistem atau *resource use monitoring* (RUM).
2. Dalam program pengembangan bisnis masyarakat, sebaiknya dimulai dengan kajian potensi dan pasar. Keluaran kajian ini berupa model bisnis yang dapat menjadi pedoman pengembangan. Hasil dari kajian juga dapat menjadi pertimbangan untuk mekanisme insentif atau bantuan kepada kelompok.
3. Adanya dokumen peraturan sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan upaya konservasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan upaya konservasi dan penegakan hukum dapat dilakukan, karena ada dasar peraturan yang mengatur. Salah satu contohnya adalah dalam upaya perikanan berkelanjutan, peraturan desa dapat dibuat untuk menetapkan daerah larang tangkap dan daerah pariwisata. Selain itu, bisa dibuat peraturan desa yang menetapkan pasir, mangrove, karang menjadi aset desa, maka kegiatan ekstraktif dapat diatur, bahkan bisa dibuat tarif untuk wisata di lokasi-lokasi ini.

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp 376,672,488.00
- b. Pengeluaran : Rp 418,605,000.00
- c. Saldo : - Rp 41,932,552.17